

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Parigi Moutong

Fakhruddin Nur¹, Gerry Katon Mahendra²

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta^{1,2}

E-mail: gerrykaton@unisayogya.ac.id

Abstrak, Peraturan daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Parigi Moutong mulai berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dan menawarkan alternatif solusi atau policy brief dan/atau merancang kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong di masa yang akan datang, sekaligus mengetahui keberadaan lintas sektor dalam penanggulangan bencana di Parigi Moutong. Daerah. Mengetahui bagaimana menerapkan rencana penanggulangan bencana selama fase tanggap darurat untuk banjir, tanah longsor, badai, atau abrasi di Kabupaten Parigi Moutong juga penting. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yang disebut juga dengan teknik naturalistik, yang menurut Sugiyono (2016) merupakan salah satu jenis metodologi yang digunakan untuk menilai keadaan alam. Berdasarkan hasil kajian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah secara umum sudah cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan di beberapa bidang termasuk karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar implementor, evaluasi dan sosialisasi implementasi, sumber daya implementasi, dan lingkungan sosial. Dan hasil penelitian lapangan menunjukkan masih ada sebagian kebijakan yang belum tepat pada sasarannya dan belum terselesaikan sehingga masih memicu adanya kesalahpahaman antar dua belah pihak yaitu masyarakat terdampak dan juga implementor daerah terutama kepala daerah, sehingga perlu adanya evaluasi, edukasi pencegahan terkait bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara andil juga merata kepada setiap daerah di Kabupaten Parigi Moutong.

Kata kunci: *Implementasi, kebijakan, penanggulangan bencana*

Abstract, The objective of this research is to examine policy implementation and provide alternative solutions, policy briefs, and policy designs for disaster management in the future in Parigi Moutong Regency. This study also investigates cross-sectoral disaster management in Parigi Moutong Regency in order to identify factors that influence implementation success or failure. The other goal is knowing the sectors that influence the disaster management preparedness stage and how to implement disaster management policies during the emergency response stage for floods, landslides, hurricanes, or abrasion in Parigi Moutong Regency. According to Sugiyono (2016), qualitative research methods or naturalistic methods were a procedure for studying the state of natural items. The study's findings showed that, generally speaking, the implementation of Parigi Moutong Regency's Regional Regulation No. 12 of 2012 addressing the implementation of disaster management in the region, Central Sulawesi Province was quite good, but that several factors, namely: policy implementation, characteristics of implementing agents, communication between implementers, evaluation and dissemination of implementation, implementation resources, still required improvement.

Keywords: *Implementation, Regulation, Disaster Management*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negeri yang tercatat rawan musibah, baik musibah alam ataupun musibah non alam. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keadaan geografis, biologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang diakibatkan oleh alam, nonalam, maupun komponen manusia yang menimbulkan korban jiwa, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. hak asasi manusia, degradasi lingkungan, kerugian harta benda, dan efek psikologis yang, dalam beberapa keadaan, dapat menghambat pertumbuhan nasional

Zona sesar Palu-Koro, tempat Sulawesi Tengah berada, rentan terhadap bencana, meskipun tidak sering menimbulkan kerusakan yang berarti. Beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah, antara lain Parigi Moutong, Toilitoli, Sigi, dan Morowali, mengalami bencana selama empat tahun terakhir. Selain itu, lima desa di Kecamatan Parigi Selatan diserang di kawasan Parigi Moutong, mengakibatkan ratusan orang mengungsi dan ratusan bangunan rusak parah. Wilayah Sulawesi Tengah Tsunami dan gempa bumi melanda berbagai lokasi, antara lain Kota Palu, Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya pada September 2018.

Kabupaten Parigi Moutong sering terkena bencana sosial atau alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Bab I jika: bencana adalah suatu kejadian yang mencela dan membatasi kehidupan dan penghidupan penduduk karena aspek alam dan/atau aspek nonalam atau manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, daerah, kehilangan harta benda, dan konsekuensi psikologis, terutama efek psikologis pada anak usia dini.

Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, badai, tanah longsor, kebakaran yang meluas, dan abrasi, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 Salah satu inisiatif pemerintah untuk melindungi penduduk dari bencana alam adalah penanggulangan bencana. Sesi paham darurat merupakan aktivitas yang dicoba dikala musibah yang berlangsung guna kurangi akibat negatifnya. Banjir merupakan salah satu musibah yang kerap berlangsung di kabupaten Parigi Moutong serta sangat urgen untuk diatasi demi terciptanya keamanan untuk warga Parigi Moutong. Kabupaten Parigi Moutong tercantum dalam urutan keempat dalam klasifikasi ancaman resiko besar musibah di Sulawesi Tengah. Perihal itu bersumber pada indeks resiko musibah Indonesia (IRBI) Sulawesi Tengah.

Seperti yang dirujuk dari Robert Eyestone kebijakan publik merupakan Karena mencakup berbagai topik, gagasan tentang hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya dianggap sangat luas dan tidak jelas. Menurut Thomas R. Dye, "Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dicoba", Atrin Chrisporas dan Dr. Margaretha Suryaningsih, MS (2019). Richard Rose menggambarkan kebijakan sebagai seperangkat tindakan yang kurang lebih terkait dan efeknya pada pihak-pihak yang terlibat daripada sebagai pilihan tunggal.

Kebijakan, atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy, sebenarnya biasanya terikat dengan keputusan pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Said Zainal Abidin (2016), karena pemerintah memiliki yurisdiksi atau kapasitas untuk memusatkan warga dan bertanggung jawab untuk memajukan kepentingan universal. Oleh karena itu, kebijakan adalah pilihan yang dibuat oleh pemerintah untuk memajukan semua kepentingan.

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, pejabat, kelompok, pemerintah, atau organisasi swasta yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan tertentu. Organisasi-organisasi ini menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang mempengaruhi warga negaranya. Mengingat konteks tersebut di atas, bencana alam yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong, di mana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, hingga penulis tertarik buat melaksanakan riset dengan judul **"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah"** untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Pendekatan studi ini adalah teknik untuk memperoleh dan mencari suatu informasi atau data, menganalisis, menyimpulkan, mencatat informasi atau data yang sifatnya primer maupun sekunder yang nantinya digunakan sebagai penyusunan laporan observasi. Seperti yang di kemukakan Sugiyono (2018) melaporkan kalau Proses melakukan penelitian pada hakikatnya adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Implementasi Kebijakan Kebencanaan

Implementasi kebijakan bencana yang telah dilakukan pemerintah dan juga masyarakat Parigi Moutong sudah disesuaikan dengan apa yang tertuang pada Peraturan Daerah "Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah", sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dalam melakukan koordinasi antar pihak instansi terkait mengenai proses perbaikan bencana di setiap daerah Kabupaten Parigi Moutong tepatnya, dengan melihat dari dampak dan situasi keadaan yang terdampak bencana disalahsatu Desa Boyangtongo tepatnya di Daerah Kecamatan Parigi Selatan.

Implementasi kebijakan ialah menyatukan dalam bentuk satu kaitan sehingga tidak mempersulit cita-cita peraturan untuk terealisasi sebagaimana dampak yang timbul dikarenakan pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong. Implementasi ini dapat dilihat secara luas, sebagai langkah dalam proses perumusan kebijakan sesaat setelah undang-undang disahkan. Definisi luas implementasi adalah penerapan undang-undang

di mana individu, organisasi, prosedur, dan metode yang berbeda berkolaborasi untuk melaksanakan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan program atau kebijakan. Di sisi lain, implementasi adalah fenomena lingkungan yang dapat dilihat sebagai proses, hasil, atau pengaruh. Dengan demikian, pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong telah selesai.

Sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana Daerah Khusus Di Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana perda tersebut berjalan selaras dengan yang tertulis sebagaimana perda yang berisi tentang Penganggaran serta pula Penanggulangan Musibah Wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Kabupaten Parigi Moutong merupakan tempat wilayah yang tercatat dengan rentan terbentuknya musibah alam, semacam banjir serta pula gempa bumi, sebagaimana, analisis menimpa kajian bahaya didapatkan bersumber pada tipe kemungkinan musibah yang terjalin di Kabupaten Parigi Moutong. Kemungkinan musibah diperoleh dari sejarah peristiwa serta mungkin terjalin sesuatu musibah. Lewat kemungkinan musibah serta informasi pengkajian resiko musibah yang terdapat di Kabupaten Parigi Moutong, bisa diperkirakan besaran luas bahaya yang hendak terjalin di Kabupaten Parigi Moutong. Jumlah dan besaran luas bahaya mengacu kepada data luas wilayah pada Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan penggunaan data dari daerah tersebut.

1. Karakteristik Agen Pelaksana Implementasi

Menurut van M dan van Horn (1975), yang meneliti ciri-ciri lembaga pelaksana, evaluasi ini tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi. Ciri, konvensi, dan pola keterkaitan yang berulang kali terjalin dalam badan eksekutif yang memiliki ikatan potensial dan aktual dengan apa yang mereka miliki melalui penegakan aturan disebut sebagai struktur birokrasi. Van M. dan van Horn (1975) membahas sejumlah elemen yang dapat mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi mengimplementasikan kebijakan.

- 1) Kualifikasi dan atribut anggota staf agensi
- 2) Tingkat kontrol hierarkis atas keputusan dan prosedur yang dibuat oleh sub-unit dalam badan pelaksana.
- 3) Sumber daya politik organisasi (seperti dukungan dari anggota eksekutif dan legislatif)
- 4) Vitalitas organisasi.
- 5) Tingkat komunikasi "terbuka", yang digambarkan sebagai jaringan komunikasi horizontal dan vertikal yang mengalir bebas dan sejumlah besar kebebasan dalam berkomunikasi dengan orang-orang di luar organisasi.
- 6) Hubungan formal dan informal antara badan dan badan yang membuat atau mengimplementasikan keputusan.

2. Komunikasi Implementor Daerah.

Pola koordinasi yang dilakukan oleh implementor kebencanaan atau masing-masing pihak yang berkepentingan dalam menangani bencana alam maupun non alam. Dalam hal ini semua instansi pemerintah yang terkait dalam penanggulangan bencana di daerah untuk berkomunikasi antar pihak yang berkepentingan atas bencana yang terjadi di daerah terutamanya.

3. Sikap Evaluasi dan Sosialisasi kebencanaan

Evaluasi dan juga sosialisasi dimana adalah sebuah proses untuk mengedukasikan secara individu maupun kelompok, meliputi cara memahami nilai-nilai penting untuk mengenal apa itu kesiapsiagaan bencana dan juga mitigasi bencana secara cermat kepada masyarakat, dengan melakukan evaluasi serta mensosialisasikan tentang kebencanaan. Sikap terhadap pelaksana atau pemangku kepentingan dalam melakukan evakuasi dan juga sosialisasi terhadap anggota-anggota dalam menjalankan salah satu implementasi bencana daerah sehingga mendapatkan hasil maksimal dalam melakukan suatu implementasi.

4. Sumber daya implementasi

Mengenai dengan adanya implementasi maka tidak jauh lagi dengan pemberdayaan setelah terjadinya implementasi sebagai salah satu badan ukur adanya kendala maupun anggaran yang dilakukan oleh seorang implementor maka dari itu diadakan salahsatu wawancara oleh seorang peneliti. Sebagaimana wawancara mengenai adanya implementasi penanggulangan bencana, untuk mengetahui pengeluaran ataupun anggaran terkait implementasi kebencanaan.

5. Standard dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), langkah penting dalam pemeriksaan implementasi kebijakan adalah identifikasi indikator kinerja. Metrik kinerja ini mengevaluasi sejauh mana tindakan mendasar dan tujuan kebijakan telah dicapai. Menguraikan tujuan dari keputusan kebijakan dapat dicapai dengan menggunakan ukuran dan tujuan dasar. Sebagaimana dalam sebagian permasalahan yang di temui dalam mengenali serta pula mengukur sesuatu kinerja, sehingga terdapat 2 pemicu yang dikemukakan mengenai penelitian ini yaitu: pertama, disebabkan oleh program dalam melakukan implementasi itu terlalu luas. Kedua, adanya kekaburan dan kontradiksi mengenai implementasi dalam mengukur suatu implementasi maupun suatu tujuan kebijakan.

B. Implementasi Kebijakan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dalam menentukan implementasi kebijakan mengenai kebencanaan ini sudah berhasil atau gagalnya implementasi tersebut, Oleh karena itu, peneliti menggunakan atau mengembangkan teori van meter dan van horn yang dihubungkan dengan indikasi keberhasilan atau

kegagalan implementasi kebijakan kebencanaan saat melakukan penelitian ini, sebagaimana peneliti sudah melakukan wawancara terhadap pihak terkait seperti dari pemangku kebijakan utamanya yaitu BPBD, dan mengimplementori daripada bagian instansi terkait seperti dari pihak instansi terkait yaitu DINAS SOSIAL, sebagaimana dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam melakukan wawancara terhadap pihak terkait, bahwa implementasi ini memiliki peran masing-masing dalam melakukan implementasi kebencanaan yaitu seperti:

1. Implementasi BPBD

Sebagaimana implementasi yang dilakukan sudah cukup terstruktur dan juga terlaksana sebagaimana dalam implementasi kebijakan tersebut dari pihak BPBD sendiri melakukan implementasi itu mengacu pada peraturan penganggaran penanggulangan bencana daerah di wilayah Parigi Moutong diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012, dan pelaksanaannya dilakukan mulai sebelum, saat, dan setelah bencana.

2. Implementasi Dinas Sosial

Implementasi yang dilakukan itu sudah terlaksana sebagaimana dinas sosial sendiri sudah mempunyai/ Atau menaungi salah satu organisasi yang tanggap siaga bencana yaitu Tagana, sebagaimana dinas sosial juga melakukan implementasi dengan mengikuti intruksi terkait kebencanaan yaitu BPBD.

3. Implementasi Tagana

Terkait Implementasi kebijakan bencana tagana sudah melakukan implementasi sebagaimana dalam wawancara tersebut bahwa implementasi kebencanaan sudah dilakukan dengan secara terstruktur, serta adanya sosialisasi bersama dinas sosial dalam menanggapi bencana daerah.

4. Implementasi Wahda Islamic centre

Implementasi yang dilakukan wahda dalam penanggulangan bencana tentunya wahda sendiri lebih berpartisipasi dalam melakukan implementasi terkait bencana yaitu dalam bentuk dana maupun anggaran yang dibutuhkan. Dalam hal ini wahda melakukan implementasi lebih pada bentuk kemanusiaan dan implementasi dilakukan dengan cara langsung tetapi melakukan implementasi tentunya bekerja sama dengan Tagana karena dalam hal kebencanaan tersebut yang mengatur strategi mengenai tempat yang terpenuhi dan yang membutuhkan itu perlu adanya koordinasi.

C. Karakteristik Implementor

Jika memandang karakteristik badan- badan pelaksana dengan melaksanakan wawancara, Sebagaimana dicatat oleh van Meter dan van Horn (1975), sistem birokrasi tidak dapat dipisahkan dari pemeriksaan ini. Struktur birokrasi dimaksudkan untuk menjadi identitas, norma, dan pola korelasional yang berulang kali terjalin dalam badan eksekutif yang memiliki potensi baik dan korelasi nyata dengan apa yang mereka miliki melalui penegakan aturan.

1. Karakteristik BPBD

Mengenai karakteristik yang dilihat bahwa BPBD dan anggotanya sudah terjalin dengan secara terstruktur karena dengan adanya strategi dalam menghadapi kebencanaan itu sudah terlihat dan terlaksana dengan baik, serta adanya dukungan dan juga dorongan dari pimpinan daerah, sebagaimana kinerja terhadap pimpinan dan juga anggota.

2. Karakteristik dinas sosial

Sebagaimana yang telah dilakukan dalam dokumentasi dan juga observasi bahwasanya kepala bidang linjamsos dinas sosial dan juga pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana daerah tersebut sudah sosialisasi terlebih dahulu dalam kerja sama kepada anggotanya untuk membentuk strategi penanggulangan dalam melakukan implementasi kebijakan mengenai bencana daerah.

3. Karakteristik Tagana

Dengan melalui metode wawancara bahwasanya Tagana sebagai organisasi yang sangat terkait pada kebencanaan itu sangat berperan penting pastinya, dengan itu koordinator lapangan tagana sangat mendorong anggotanya dalam menanggulangi bencana alam dalam bentuk kemanusiaan.

4. Karakteristik wahda Islamic centre

Wahda Islamic centre pada dasarnya adalah organisasi dan juga membentuk suatu relawan bencana yaitu tim reaksi tanggap bencana dimana koordinator lapangan wahda pastinya selaluantisipasi dan juga mendorong anggotanya nya untuk selalu sigap dalam memberi bantuan logistic dan lain-lain.

D. Komunikasi Implementor Daerah

Implementasi hendak berjalan efisien apabila mereka yang melaksanakan kebijakan dengan integritas menyadari langkah-langkah dan tujuan. Akibatnya, perhatian khusus harus diberikan pada konsistensi atau keseragaman dimensi dan tujuan tingkat bawah yang dikomunikasikan dengan sumber data yang berbeda, kejelasan langkah-langkah dari bawah ke atas dan tujuan kebijakan, keakuratan komunikasi mereka dengan para pelaksana, dan seterusnya. BPBD Bersumber pada hasil yang didapatkan lewat wawancara kalau komunikasi antar implementor telah lumayan baik dalam perihal ini sebagaimana dilihat dari wawancara terhadap para implementor daerah yaitu BPBD dan juga Dinas Sosial yaitu dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dalam mencapai suatu tujuan implementasi.

1. Dinas sosial

Dinas sosial dalam melakukan komunikasi itu sudah cukup baik dan yang dilakukan pertama pastinya sosialisasi dengan pihak terkait kebencanaan dan juga adanya bantuan-bantuan dari para relawan pastinya.

2. Tagana

Komunikasi pastinya sudah berjalan lebih setelah memberikan evaluasi kepada anggota-anggota terlebih dahulu serta mensosialisasikan pada pihak terkait

kebencanaan.

3. Wahda Islamic centre

Komunikasi sudah terjalin cukup baik untuk mengetahui adanya implementasi penanggulangan bencana, yaitu wahda sudah menjalin suatu komunikasi terhadap instansi terkait seperti Dinas sosial dll.

E. Sosialisasi dan Evaluasi kebencanaan

Van Meterr serta Van Horn (1975) mengatakan bahwa perlu menyaring setiap elemen model yang disebutkan sebelumnya melalui perspektif pelaksana di negara tempat kebijakan itu dibuat. Mereka kemudian membuat daftar tiga faktor—kognisi (pemahaman, deskripsi) kebijakan dan berbagai asumsi tentangnya—yang mungkin berdampak pada asumsi dan kemauan pelaksana untuk menerapkan kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan) serta keseriusan asumsi itu.

Kognisi/pemahaman, dan tanggapan kebijakan implementor kebencanaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti bahwa instansi terkait terutama BPBD dalam memberikan pengertian terkait implementasi bencana sudah terlaksana seperti penyampaian apa itu mitigasi bencana alam dan bagaimana kesiapsiagaan dalam bencana alam, dimulai sebelum kejadian, berlanjut selama itu, dan berakhir setelahnya. Mengenai tanggapan adanya program implementasi ini juga bahwa program implementasi ini juga didukung oleh pimpinan daerah dan terlebih lagi para implementor-implementor dari instansi-instansi terkait pastinya, dan ikut serta untuk selalu menyukseskan implementasi kebijakan bencana daerah tersebut. Tanggapan Kebijakan tentunya dari instansi terkait sangat mengapresiasi adanya implementasi bencana ini dengan membantu pihak utama yaitu BPBD dalam menanggulangi bencana, sehingga semua bentuk sosialisasi antar pihak bisa berjalan cukup baik.

F. Sumber Daya Implementasi

1. Sumber daya manusia

Sesuai dengan tugas yang diisyaratkan oleh kebijakan yang dilantik secara apolitis, beberapa lini proses implementasi secara keseluruhan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, implementasi kebijakan publik menjadi sangat menantang ketika kompetensi dan keterampilan sumber energi ini nol. menimpa sumber energi manusia pada perihal ini ialah para pemangku kebijakan dan sekaligus pelaksana program ini dikatakan kalau dalam perihal sumber energi manusia tidak memiliki hambatan sebab para implementor kebijakan yang melaksanakan program ini telah memiliki kompetensi dan kapabilitas yg relatif. Tidak hanya dari wawancara dengan kepala dinas di instansi terpaut dan observasi yang dicoba. Klaim bahwa sumber daya manusia dengan tingkat kompetensi dan keterampilan yang wajar terpengaruh didukung oleh studi terdokumentasi yang dicoba dengan memandang nama pegawai beserta pangkat ataupun golongannya.

2. Sumber daya finansial

Selain daripada sumber daya manusia, ada juga sumberdaya yang tidak boleh luput diperhatikan pula, yaitu, sumberdaya finansial. Sebab hal yang diharuskan, ketika terdapat sumber daya yang memadai serta memiliki pemahaman sudah tersedia tapi apabila aliran dana dari dari anggaran belum memadai, hal itu akan membuat problem yang krusial untuk dapat mewujudkan sesuatu yang diinginkan oleh tujuan peraturan masyarakat. Pada hal ini anggaran yang diturunkan sudah direalisasikan kepada masyarakat sehingga semua kebutuhan masyarakat terpenuhi mulai dari logistic dan juga pembangunan, dapat dikatakan bahwa sumber daya finansial sudah cukup baik, akan tetapi dengan melihat adanya ketidaktepatan sasaran yang menjadi kecendrungan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam membagikan dana maupun anggaran penanggulangan bencana.

G. Lingkungan Sosial

Perihal terakhir yang penting pula untuk dicermati agar diperhitungkan Menurut Van Metter dan Van Horn (1975), efektivitas implementasi publik mengacu pada seberapa besar dunia luar membantu keberhasilan kebijakan publik yang baru diterapkan. Dalam hal tersebut dengan melakukan wawancara terkait implementasi yang sudah berjalan seperti apa dan bagaimana respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan dalam penanggulangan bencana. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial dan juga pihak terkait turut mendorong dalam keberhasilan implementasi kebijakan terutama mengenai kebencanaan yang telah terjadi di kabupaten Parigi Moutong.

H. Alternatif Solusi Implementasi

Sebagaimana berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung kepada pihak-pihak terkait. Dengan demikian peneliti mendapatkan alternative solusi atau policy brief dari masalah yang terjadi pada implementasi kebijakan tersebut terhadap intansi terkait maupun masyarakat daerah Kabupten Parigi Moutong, yang harus diutamakan terkait implmentasi kebijakan penanggulangan bencana tentunya, yaitu:

- a) Memberikan arahan terhadap implemetor bagaimana implementasi keijakan kebencanaan itu dijalankan sebagaimana yang mecakup dalam penanggulangan bencana daerah, mitigasi bencana, manajemen tanggap darurat, pemulihan, dan konstruksi dan juga merata kepada setiap daerah di Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Menepatkan sesuai sasaran dan juga menetapkan standardisasi pada kebutuhan penyelenggaraan penanggulanagan bencana sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Parigi Moutong.
- c) Memberikan kegiatan-kegiatan secara menyeluruh mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat sehingga dapat menjadi acuan masyarakat dalam menangani bencana sebelum, selama, dan sesudahnya. Ia mampu meramalkan bencana di masa depan, sama seperti hal-hal ini.

- d) Memperhatikan dan mempertanggung jawabkan adanya anggaran-anggaran mulai dari pembangunan daerah yang terdampak dan dana mengenai anggaran itu harus sesuai dengan data yang dimasukkan sehingga diturunkan secara merata dan juga menyeluruh pada setiap daerah di Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam hal ini alternative solusi adalah sesuatu yang harus diperhitungkan ketika bertindak implementasi dengan melihat adanya kekurangan yang didapatkan dalam implementasi kebijakan kebencanaan ini, maka peneliti memberikan policy brief atau alternative solusi dalam menanggulangi bencana daerah yang belum terlaksana dengan sesuai tujuan kebijakan dalam pengsiasatan pasca bencana di daerah Kabupaten Parigi Moutong tersebut.

4. Kesimpulan

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, secara umum telah dilaksanakan dengan baik, namun masih memerlukan revisi di beberapa bidang, antara lain: (1) Implementasi kebijakan, jika tujuan kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini telah dipahami dengan jelas, seperti kerjasama (4) Penilaian dan sosialisasi implementasi, dari sudut pandang ini, sudah baik karena tidak ada pelaksana yang menolak implementasi ini dan menunjukkan dukungannya terhadap implementasi ini program dengan mengikutsertakan semua lembaga yang kepentingan utamanya, sehingga semua memiliki peran dalam pelaksanaannya; Namun, untuk mencapai tujuan, perhatian tetap diperlukan untuk terlebih dahulu mengesampingkan poin posisi yang telah diberikan dan yang belum. Selain itu, ada perkembangan yang tidak lengkap. (6) Sektor sosial yang berdasarkan hasil penelitian berdampak pada bagaimana kebijakan diimplementasikan karena mendapat dukungan baik dari sumber internal maupun eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Atrin Chrisopras Setyowati, dkk. 2018. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. Universitas Diponegoro
- Aulia Asman et all. 2020. Mitigation and Adaptation of Community using AHP in Earthquake Disaster-Prone Areas in Pagar Alam City – Indonesia. International Journal of Management and Humanities (IJMH) Vol. 4 Issues. 9: 34-38
- Eva Safitri. 2018. Ada 131 Gempa Susulan di Donggala dan Palu. <https://news.detik.com/berita/d-4234706/ada-131-gempa-susulan-di-donggala-dan-palu> di akses 14 Oktober 2020
- Humas Pemda. 2020. BPBD Parigi Moutong Terima Bantuan Kecamatan Untuk Distribusikan. <http://www.parigimoutongkab.go.id/11-berita/1661-bpbd-parigi-moutong-terima-bantuan-kecamatan-untuk-distribusikan.html> di akses 20 Oktobrt 2020
- Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan BNPB No 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.